

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA

DIKABUPATEN SUMENEP

Oleh :Suyati

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, maka dari itu fungsi hokum sebagai wadah yang mengatur segala sesuatu termasuk perlindungan hak asasi manusia, diantara permasalahan hak asasi manusia yang mencakup dalam segala hal di dalam kehidupan khususnya mengenai kejahatan asusila/pelecehan seksual

Untuk itu pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan atau kejahatan asusila/pelecehan seksual tersebut dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan pelecehan seksual serta bentuk penegakan hokum dan sanksi yang sesuai yang diharapkan mampu memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan kembali

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis nomatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diperoleh oleh sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian perundang-undangan yang sudah ada disesuaikan dengan isi hukum yang terjadi melalui hasil bahan pustaka yang dianalisis dengan teknik preskriptif kualitatif artinya bahan hukum yang diperoleh dihasilkan dari menelaah suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah permasalahan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian yang di peroleh yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya dalam mengatasi kejahatan asusila/pelecehan seksual yaitu dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai apa itu pelecehan seksual serta apa dampak yang akan terjadi akibat perbuatan tersebut, selain itu seharusnya dari pihak berwajib melakukan sosialisasi terhadap masyarakat paling tidak satu bulan satu kali untuk memberikan pengetahuan lebih jelas mengenai kejahatan asusila beserta dan pak yang akan terjadi terhadap korban pelecehan seksual tersebut, dalam penegakan hokum serta pemberian sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan kejahatan asusila /pelecehan seksual yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk penegakan dan pemberian sanksi terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum ASN, himbuan atau upaya saja tidak cukup harus ada sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dasar pertimbangan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep kurang efektif serta penegakan hokum dan pemberian sanksi yang kurang sesuai mengingat kejahatan tersebut sangat merugikan bagi korban dan juga sampai saat ini masih banyak terdapat kejahatan-kejahatan terhadap asusila/pelecehan seksual, saran bagi pemerintah agar lebih memperhatikan dalam hal penegakan hokum dan

upaya penanggulangan yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus kejahatan terhadap asusila.

Kata kunci :Tindak pidana, pelecehan seksual, Aparatursipil Negara.



ABSTRACT

The Crime Of Sexual Harrassment Committed
By A Person Of The State Civil Apparatus
In Sumenep Regency

Oleh :Suyati

The State of Indonesia is a country that upholds law enforcement, and therefore the function of law as a forum that regulates everything including protection of human rights, among human rights issues that include in all matters in life especially regarding immoral crime / sexual harassment

For this reason, the government is expected to be able to overcome the problem or immoral crime / sexual harassment by making efforts to overcome sexual harassment as well as appropriate forms of law enforcement and sanctions that are expected to provide a deterrent effect on perpetrators so as not to repeat the crime again

The research method used in this research is a nominally juridical approach to the statutory approach obtained by primary and secondary legal material sources, then the existing legislation is adjusted to the content of the law that occurs through the results of library material analyzed qualitative prescriptive technique means that the legal material obtained is produced from examining a problem based on legislation, by examining the problem from general to specific.

The research results obtained are the efforts made by the government of Sumenep Regency specifically in dealing with sexual immorality / sexual harassment by providing basic knowledge about what sexual harassment is and what impact it will have as a result of the act, in addition it should be from the authorities to conduct socialization on the public at least once a month to provide clearer knowledge about immoral crime along with the impact that will occur on victims of sexual harassment, in law enforcement and sanctions against perpetrators proven to have committed sexual immorality / sexual harassment that have been established by the Law for enforcement and sanctions for sexual harassment by an ASN, appeals or efforts alone are not enough there must be sanctions given to perpetrators.

The conclusion of this study is that the basis for consideration of the handling by the Sumenep Regency government is less effective and law enforcement and inappropriate sanctions given that the crime is very detrimental to the victim and also until now there are still many crimes against immorality / sexual harassment, suggestions for the government to pay more attention in terms of law enforcement and countermeasures that are expected to minimize the occurrence of criminal cases against immorality.

Keywords: Crime, sexual harassment, State civil apparatus.